

LAPORAN KINERJA 2021



PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

PENGANTAR

KEPALA PUSAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN SDM

Puji dan syukur kami panjatkan pada Tuhan yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Pusat Perencanaan Pengembangan SDM (Pusrenbang SDM) Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusrenbang SDM selama tahun 2021. Penyusunan LKj ini sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat uraian tentang gambaran umum, perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja Pusrenbang SDM. Selain itu juga, laporan ini memuat permasalahan yang dihadapi Pusrenbang SDM selama tahun 2021 dan upaya tindak lanjut.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pusrenbang SDM telah berkinerja secara optimal dengan rata-rata capaian kinerja Tahun 2021 sebesar 107,3 %. Capaian tersebut didukung dengan penyerapan anggaran sebesar Rp. 4.888.805.719,00 atau 99,98% dari pagu anggaran sebesar Rp. 4.889.899,00. Pusrenbang SDM telah melaksanakan kegiatan dengan efisien yang ditunjukkan dengan nilai rasio efisien sebesar 1,01

Atas tersusunnya laporan ini disampaikan ucapan terima kasih terhadap semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu mulai dari persiapan sampai dengan selesainya laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Desember 2021

Kepala Pusat,



A. Palguna Ruteka

NIP. 19650924 199303 1 001



A. Palguna Ruteka

RINGKASAN EKSEKUTIF

CAPAIAN DALAM ANGKA 2021

Pusat Perencanaan Pengembangan SDM merupakan salah satu Unit Eselon II Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) yang mempunyai tugas dalam Perencanaan dan Pengembangan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berdasarkan Rencana Kerja tahun 2021, Kegiatan Perencanaan dan Pengembangan SDM mempunyai sasaran kegiatan "**Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan kompeten**", dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yaitu:

1. Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK, 1 Layanan (5 Jenis Jabatan);
2. Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK, 1 Layanan (5 Jenis Jabatan); dan
3. Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya 1.000 orang

Adapun capaian kinerja Pusrenbang SDM Tahun 2021 terhadap pencapaian 3 (tiga) IKK sebesar 107,3 % dengan dukungan realisasi anggaran sebesar 99,98% dari pagu anggaran. Pengukuran efisiensi capaian kinerja terhadap penggunaan anggaran tahun 2021 mencapai 1,01 % yang berarti Pusrenbang SDM telah berkinerja lebih efektif. Sedangkan untuk efektifitas capaian kinerja belum dapat diukur, karena tahun 2020 merupakan tahun awal Renstra..



107.3 %

**CAPAIAN KINERJA
PUSRENBANG SDM**

99,98 %

**REALISASI ANGGARAN
PUSRENBANG SDM**

EFISIEN



100 %

Peta Pengembangan Kompetensi
SDM Aparatur, **1 Layanan**



100 %

Peta Pengembangan Kompetensi
SDM Non Aparatur, **1 Layanan**



121,9 %

Jumlah SDM LHK yang meningkat
kompetensinya, **1.219 Orang**

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
PENDAHULUAN	1
PERENCANAAN KINERJA	6
AKUNTABILITAS KINERJA	11
PENUTUP	38



BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG



Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM adalah unit Eselon II pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM. Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusrenbang SDM mempunyai tugas dalam Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur dan Masyarakat Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dinamika dan tantangan kekinian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusrenbang SDM melaksanakannya dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan

Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja wajib disusun dan disampaikan untuk melaporkan kinerja Pusrenbang SDM sebagaimana tercermin dalam Rencana Strategis (Renstra) dan dokumen Perjanjian Kinerja (PK). Laporan ini juga dimaksudkan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Pusrenbang SDM di masa yang akan datang.

TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Kinerja Pusrenbang SDM diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran program di Badan P2SDM sesuai dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021

TUGAS

melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber daya aparatur dan non aparatur lingkungan hidup dan kehutanan

FUNGSI

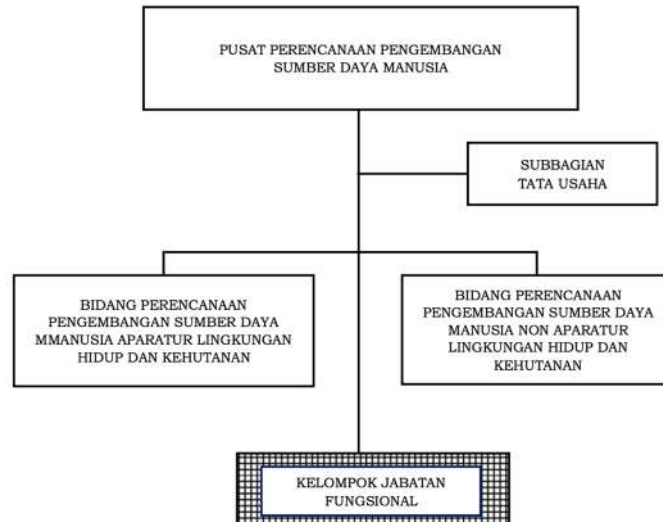
- ❖ penyusunan rencana, program, kerjasama, kebijakan teknis sistem dan materi penilaian kompetensi serta pelaksanaan perencanaan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- ❖ pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan penilaian kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- ❖ pengembangan standar kompetensi dan penilaian kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- ❖ penyelenggaraan penilaian kompetensi sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- ❖ bimbingan teknis di bidang perencanaan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
- ❖ pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan penilaian kompetensi dan perencanaan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan; dan
- ❖ pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, dan pelaporan administrasi pusat.

ORGANISASI

Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM sebagai Eselon II yang dipimpin oleh seorang Kepala Pusat terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha, Bidang Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan

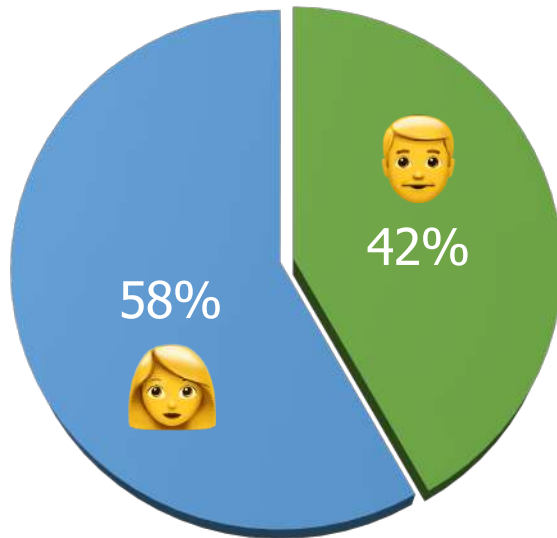
Sumberdaya Manusia Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Bidang Perencanaan Pengembangan Sumberdaya Manusia Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan..

Adapun Struktur Organisasi Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target kinerja, pada tahun 2021 Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM didukung oleh sebanyak 46 orang dengan sebaran pegawai sebagai berikut:



Golongan

IV		7
III		20
II		3
PPNPN		16

Pendidikan

Doktor		1
Pascasarjana		16
Sarjana		17
Diploma		5
SLTA		5



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

PUSRENBANG SDM 2020 S/D 2024

Pusrenbang SDM mendukung program Badan P2SDM Melalui kegiatan “**Perencanaan Pengembangan SDM**” dengan sasaran kinerja program “**Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten sebanyak 35.000 Orang**”.

Kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu:

1. Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK, 25 Jenis Jabatan;
2. Pete Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK, 25 Jenis jabatan; dan
3. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya, 35.000 Orang

TARGET RENSTRA PUSRENBANG SDM 2020 S/D 2024

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Peta pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5 Jabatan	5 Jabatan	5 Jabatan	5 Jabatan	5 Jabatan
2	Peta pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5 Jabatan	5 Jabatan	5 Jabatan	5 Jabatan	5 Jabatan
3	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	7.000 Orang	7.000 Orang	7.000 Orang	7.000 Orang	7.000 Orang

RENCANA KERJA PUSRENBANG SDM

TARGET IKK TAHUN 2021

Rencana Kerja Pusrenbang SDM Tahun 2021 merupakan kerangka kerja dan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2021. Sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian kinerja, telah ditetapkan target yang akan dicapai pada Tahun 2020 sebagai berikut:

- 1 Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK
5 Jenis Jabatan
- 2 Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK
5 Jenis Jabatan
- 3 Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya
1.000 orang

Dalam rangka mendukung pembiayaan penyelenggaraan kegiatan "**Perencanaan Pengembangan SDM**", pada Tahun 2021 Pusrenbang SDM didukung alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 5.652.645.000,- Dalam perjalanannya, pagu anggaran APBN tersebut mengalami

Pergeseran menjadi sebesar Rp. 4.889.899.000,- karena adanya refocusing anggaran dengan adanya darurat pandemi COVID 19 serta adanya revisi belanja pegawai (51) pada DIPA Kantor Pusat Badan P2SDM untuk belanja penanganan COVID 19 pada bulan Oktober 2021.

Adanya perubahan PAGU anggaran dan refocusing anggaran, tidak mempengaruhi target Indikator Kinerja kegiatan. Refocussing anggaran dilakukan dengan strategi menghemat anggaran perjalanan dinas, mengubah mekanisme rapat dan pertemuan dari tatap muka menjadi online/jarak jauh.

Selama tahun 2021, dengan situasi pandemi COVID 19, metode pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian target kinerja masih dengan metode jarak jauh/online serta pertemuan tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protocol kesehatan yang ketat.

INDIKATOR KEGIATAN DAN ELEMEN KEGIATAN PUSRENBANG SDM TAHUN 2021

INDIKATOR KEGIATAN	ELEMEN KEGIATAN
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	1. Pemetaan Kompetensi SDM Aparatur LHK 2. Revitalisasi SDM Aparatur LHK 3. Pengembangan Budaya Kerja
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1. Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi SDM NA LHK 2. Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Sub Sektor LHK 3. Revitalisasi SDM Non Aparatur LHK 4. Pemantauan dan Evaluasi Renbang Kompetensi SDM NA LHK 5. Perumusan Exit Strategi Tenaga Teknis Pendukung Kehutanan 6. Pemantauan Tenaga Teknis Pendukung Kehutanan
SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya	1. Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM LHK 2. Pengembangan Standar Kompetensi SDM LHK
Layanan Dukungan Manajemen	1. Penyusunan dokumen rencana program dan anggaran 2. Evaluasi dan Pelaporan 3. SPIP Lingkup Pusrenbang SDM 4. Operasional Kegiatan Perkantoran 5. Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Perjanjian Kinerja



Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) antara Kepala Badan P2SDM dan Kepala Pusrenbang SDM ditandatangani pada Bulan Desember 2020. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan IKK beserta target kinerja dan anggaran. Target Kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai pada satker sesuai dengan indikator kinerja kegiatan.

Sasaran	Indikator Kinerja 2020 - 2024	Target Kinerja 2021
Tersedianya SDM LHK yang Kompeten	Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5 Jabatan
	Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5 Jabatan
	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	1.000 Orang

PAGU Awal : Rp. 5.652.645.000,-

PAGU Revisi : Rp. 4.889.899.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

METODE PENGUKURAN

Pengukuran Capaian Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM. Pengukuran dilakukan menggunakan formula sebagai berikut:



CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran. Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pencapaian rencana dan keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Pengembangan SDM tahun 2021.

CAPAIAN KINERJA PUSRENBANG SDM TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		REALISASI			
	Anggaran	Fisik	Anggaran	%	Fisik	%
Peta Pengembangan SDM Aparatur LHK	2.664.904.000	5	2.664.197.194	99,97	5	100
Peta Pengembangan SDM Non Aparatur	675.000.000	5	674.877.792	99,98	5	100
Jumlah SDM LHK yang meningkat Kompetensinya	1.549.995.000	1.000	1.549.730.763	99,98	1.219	121,9
JUMLAH	4.889.899.000		4.888.805.719	99,98		107,3

Berdasarkan tabel di atas, nilai capaian kinerja Pusrenbang SDM adalah 107,3 %. Hal ini dapat dikatakan bahwa seluruh target kinerja yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja telah tercapai.

Sebagai informasi, PAGU awal anggaran Pusrenbang SDM sebesar Rp. 5.652.645.000,- pagu anggaran APBN tersebut mengalami perubahan menjadi sebesar Rp. 4.889.899.000,- karena adanya refocusing anggaran untuk mengantisipasi dampak pandemic COVID 19.

EFISIENSI CAPAIAN KINERJA

Efisiensi Capaian Kinerja sasaran Tahun 2021 dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja (fisik) Tahun 2021 dengan pelaksanaan anggaran Tahun 2021. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui Efisiensi Capaian Kinerja sasaran yang dilaksanakan Tahun 2021. Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efisien, sedangkan bila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efisien.

EFISIENSI CAPAIAN KINERJA PUSRENBANG SDM TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		% CAPAIAN		
		Kinerja	Keuangan	Efisiensi
5440.001	Peta Pengembangan SDM Aparatur LHK	100	99,97	1,00
5440.002	Peta Pengembangan SDM Non Aparatur LHK	100	99,98	1,00
5440.003	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	121,9	99,98	1,22
Rata-rata		107,3	99,84	1,07

Berdasarkan Hasil perhitungan terhadap prosentase capaian kinerja dengan realisasi keuangan, Efisiensi capaian kinerja Pusrenbang SDM Tahun 2021 untuk rata-rata 3 (tiga) IKK diperoleh nilai 1,07. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran Pusrenbang SDM dalam mencapai kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan telah efisien.

EFEKTIFITAS CAPAIAN KINERJA

Rasio efektivitas capaian kinerja diukur dengan membandingkan persen capaian kinerja tahun berjalan dengan persen capaian kinerja pelaksanaan tahun sebelumnya. Apabila rasio yang dihasilkan > 1 maka pelaksanaan pencapaian sasaran termasuk kategori efektif, sedangkan bila rasio yang dihasilkan < 1 menunjukkan pencapaian kinerja sasaran kurang efektif.

EFEKTIFITAS CAPAIAN KINERJA PUSRENBANG SDM TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TA 2020			TA 2021			Efektifitas
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Peta Pengembangan SDM Aparatur LHK	5	5	100	5	5	100	1
Peta Pengembangan SDM Non Aparatur	5	5	100	5	5	100	1
Jumlah SDM LHK yang meningkat Kompetensinya	1.000	1.022	102,2	1.000	1.219	121,9	1,2

Rasio efektivitas capaian kinerja untuk IKK 1, IKK 2 dan IKK 3 menunjukkan hasil > 1 atau dapat dikatakan pencapaian kinerja tersebut efektif,

CAPAIAN KINERJA TERHADAP RENSTRA 2020 S/D 2024

Tahun 2020 adalah tahun awal Renstra 2020 - 2024. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Pusrenbang SDM selama tahun 2020 terhadap renstra sebesar 3 %.

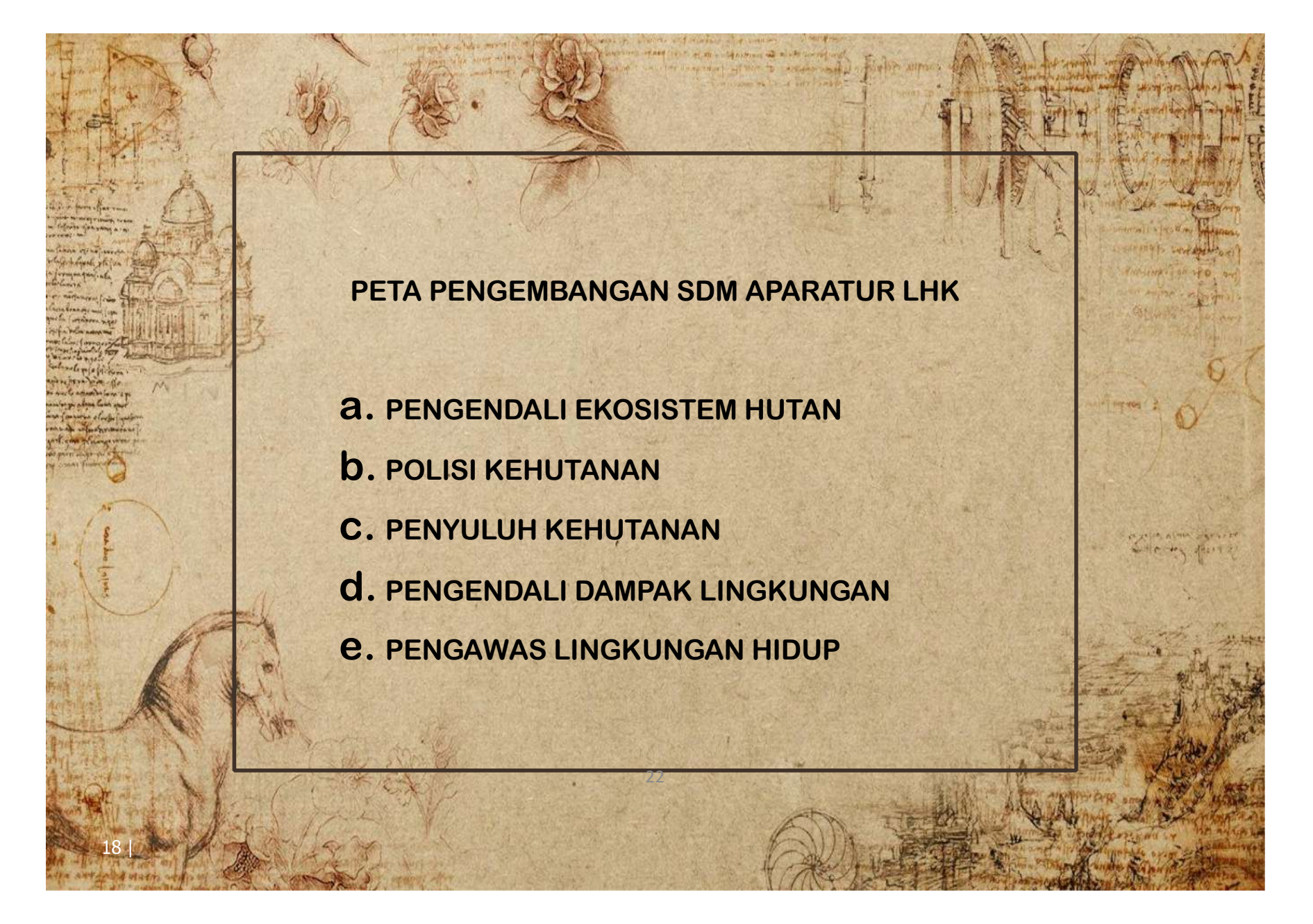
CAPAIAN KINERJA SELAMA TAHUN 2021 TERHADAP RENSTRA PUSRENBANG

Kegiatan/Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target RENSTRA	CAPAIAN					s/d 2020	
			2020	2021	2022	2023	2024	OUTPUT	%
Perencanaan Pengembangan SDM/ Tersedianya SDM LHK yang Kompeten	Peta Pengembangan SDM Aparatur LHK	25	5	5	-	-	-	10	20
	Peta Pengembangan SDM Non Aparatur LHK	25	5	5	-	-	-	10	20
	Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	35.000	1.022	1.219	-	-	-	2.231	6,3
Rata-rata									13,53

INDIKATOR KINERJA 1



**PETA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**



PETA PENGEMBANGAN SDM APARATUR LHK

a. PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

b. POLISI KEHUTANAN

c. PENYULUH KEHUTANAN

d. PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

e. PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Pemetaan kompetensi adalah kegiatan untuk mendapatkan profil kompetensi SDM melalui pengukuran/assessmen kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang sudah ditetapkan yang terdiri dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosio kultural. Profil kompetensi ini akan digunakan untuk melakukan analisis kesenjangan (gap) kompetensi SDM yang dimiliki saat ini dengan yang dipersyaratkan oleh standar kompetensi. Kesenjangan (gap) kompetensi akan dijadikan pertimbangan untuk memberikan rekomendasi intervensi terhadap kompetensi-kompetensi yang masih perlu pengembangan atau peningkatan kapasitas.

Pelaksanaan kompetensi tahun 2021, dilaksanakan dengan sasaran pejabat fungsional binaan kementerian LHK pada instansi/dinas yang menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan di daerah, dengan komposisi sebagai berikut:

No	Kelompok Jabatan	Jumlah Responden
1	PEH	268 orang
2	POLHUT	1.304 orang
3	PENYULUH	1.947 orang
4	PEDAL	321 orang
5	PLH	173 orang

Pemetaan kompetensi SDM Aparatur LHK dilaksanakan melalui aplikasi berbasis web yang diberi nama **SPEKTRA (Sistem Informasi Pemetaan Kompetensi SDM Aparatur LHK)** dengan alamat <https://simrenbang.bp2sdm.menlhk.go.id/spektra>



Kompetensi yang diamati dalam pemetaan kompetensi pejabat fungsional adalah kompetensi teknis (baik inti maupun pilihan), kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural.

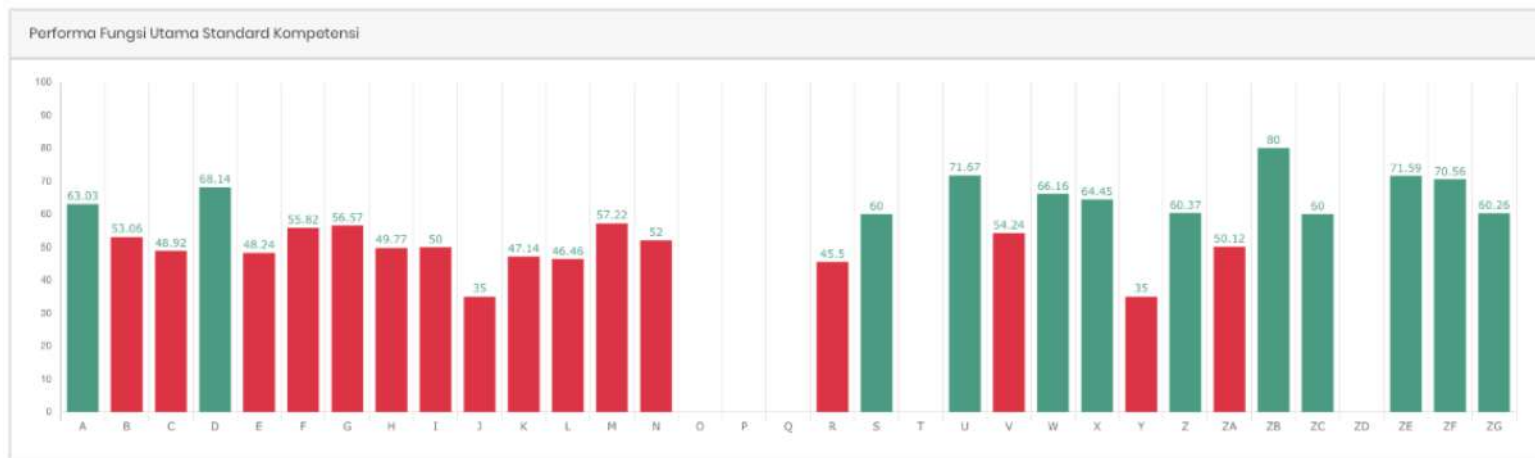
Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan pemetaan kompetensi, disusun oleh tim penyusun yang berasal dari berbagai pihak terkait yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Instrumen tersebut dikembangkan dari standar kompetensi khusus jabatan fungsional binaan kementerian LHK yang telah ditetapkan.

PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN

Pengendali ekosistem hutan adalah pejabat fungsional yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang terbagi dalam 6 (enam) bidang, yaitu:

1. Perencanaan Hutan
2. Pemanfaatan Hutan
3. Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan DAS
4. Konservasi Sumberdaya Hutan
5. Pengendalian Perubahan Iklim; dan
6. Perhutanan Sosial dan Kemitraan

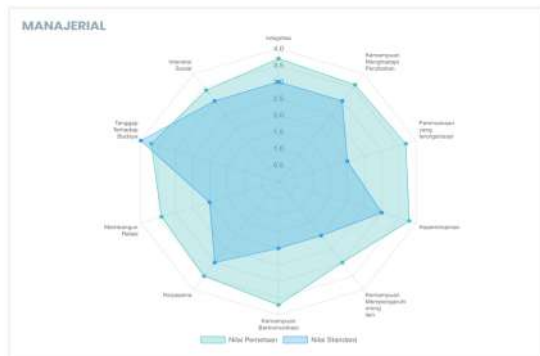
Berdasarkan hasil pemetaan, secara umum tingkat pemahaman dan kemampuan pejabat fungsional PEH dalam menerapkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas, masih kurang dan memerlukan Pengembangan Kompetensi.



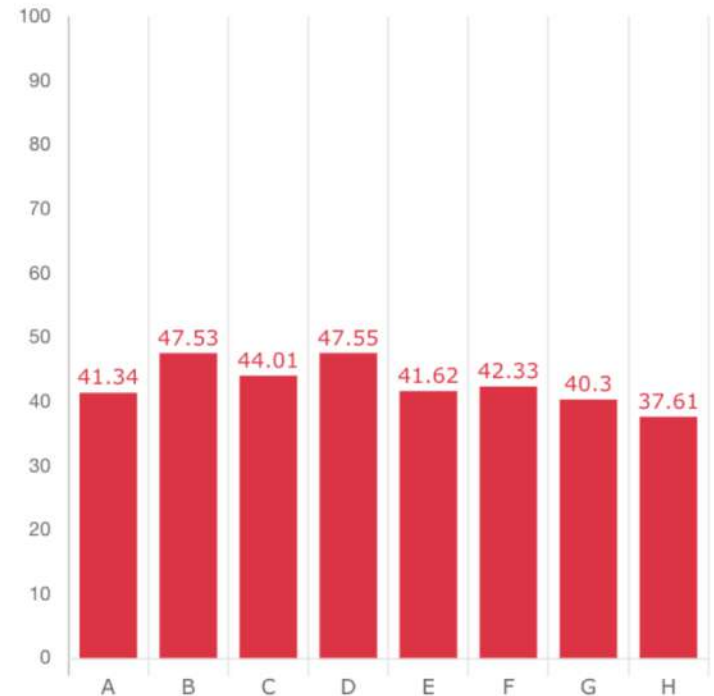
POLISI KEHUTANAN

Polisi Kehutanan (Polhut) merupakan salah satu jabatan fungsional binaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sebagai salah satu ujung tombak pembangunan kehutanan, Polisi Kehutanan diharapkan memiliki karakteristik SDM yang berkualitas dimana mereka dituntut untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetensi yang mumpuni sehingga mampu mengatasi masalah/hambatan dan mampu mengantisipasi perubahan dalam pelaksanaan tugasnya.

Berdasarkan hasil pemetaan, secara umum tingkat pemahaman dan kemampuan pejabat fungsional POLHUT dalam menerapkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas, baik inti maupun Pilihan masih memerlukan pengembangan, hal ini disebabkan adanya pelaksanaan kegiatan yang kurang menerapkan standar kompetensi pada pelaksanaannya.



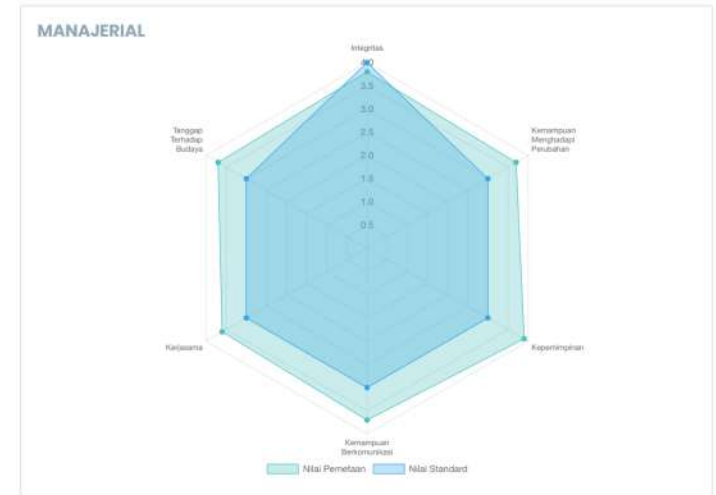
Performa Fungsi Utama Standard Kompetensi



PENYULUH KEHUTANAN

Penyuluh Kehutanan, sebagai garda depan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menjadi pilar utama dalam menjembatani dengan masyarakat luas khususnya masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar hutan bagaimana harus menyikapinya dengan perubahan teknologi yang begitu cepat. Untuk mewujudkan hal tersebut, yang perlu menjadi perhatian adalah mutu/kualitas tenaga penyuluh atau pendamping.

Berdasarkan hasil pemetaan, secara umum tingkat pemahaman dan kemampuan pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan dalam menerapkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas, baik inti maupun Pilihan sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa unit kompetensi yang masih perlu untuk dikembangkan.



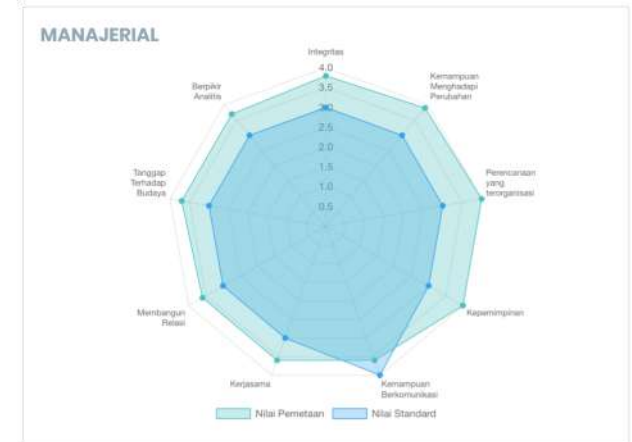
Grafik Kompetensi Teknis



PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN

Masalah lingkungan beberapa tahun terakhir sudah menjadi 'PR' negeri kita tercinta. Semua orang setuju bahwa lingkungan ini sudah rusak sehingga alam tak lagi bersahabat dengan kita. Akan tetapi, harus ada penanganan secara intensif dan terpadu khususnya dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup supaya bencana alam dapat kita cegah. Dalam pengelolaan lingkungan hidup saat ini telah memiliki beberapa pejabat fungsional yang memiliki peran penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup salah satunya adalah *Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan (JAFUNG PEDAL)*.

Berdasarkan hasil pemetaan, secara umum tingkat pemahaman dan kemampuan pejabat fungsional PEDAL dalam menerapkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas, baik inti maupun Pilihan sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa unit kompetensi yang masih perlu untuk dikembangkan.



PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP

Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu **instrumen penegakan hukum** dan merupakan **amanat UU Nomor 32 tahun 2009** tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam pasal tersebut Menteri mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH).

Berdasarkan hasil pemetaan, secara umum tingkat pemahaman dan kemampuan pejabat fungsional PEH dalam menerapkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas, baik inti maupun Pilihan sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa unit kompetensi yang masih perlu untuk dikembangkan.



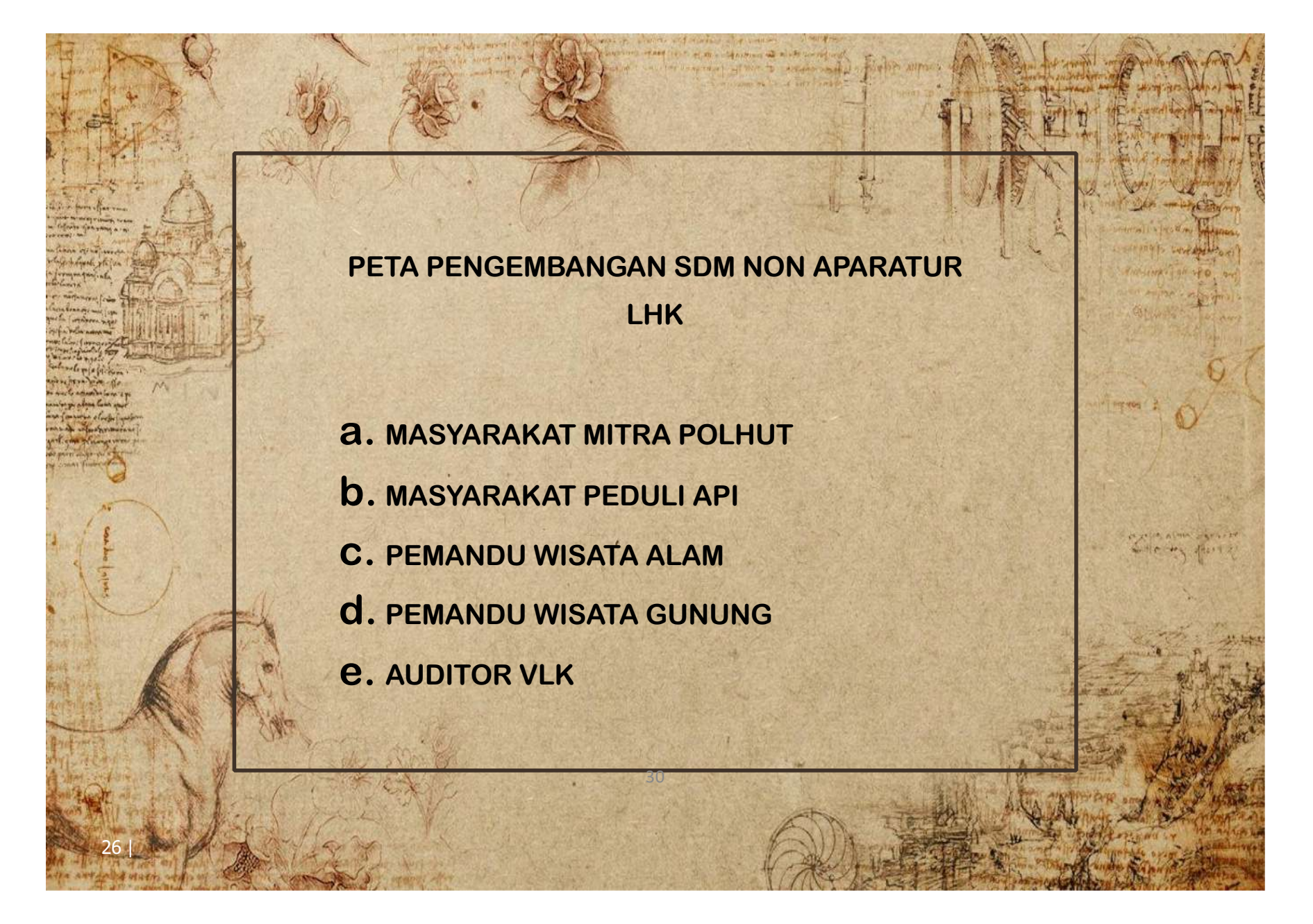
Performa Fungsi Utama Standard Kompetensi



INDIKATOR KINERJA 2



**PETA PENGEMBANGAN KOMPETENSI
SUMBER DAYA MANUSIA NON
APARATUR LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN**



PETA PENGEMBANGAN SDM NON APARATUR LHK

- a. MASYARAKAT MITRA POLHUT**
- b. MASYARAKAT PEDULI API**
- c. PEMANDU WISATA ALAM**
- d. PEMANDU WISATA GUNUNG**
- e. AUDITOR VLK**

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menuju keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, maka salah satu sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik serta kompetensi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berdaya saing. Sasaran strategis tersebut oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM diterjemahkan melalui kegiatan perencanaan dan pengembangan kompetensi SDM Non Aparatur Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertujuan untuk menganalisis kebutuhan pengembangan kompetensi SDM Non Aparatur.

Sasaran pemetaan kompetensi SDM Non Aparatur tahun 2021 adalah:

1. Masyarakat Mitra Polhut
2. Masyarakat Peduli Api
3. Pemandu Wisata Alam
4. Pemandu Wisata Gunung
5. Auditor VLK

Dengan rincian responden pemetaan kompetensi SDM Non Aparatur, sebagai berikut:

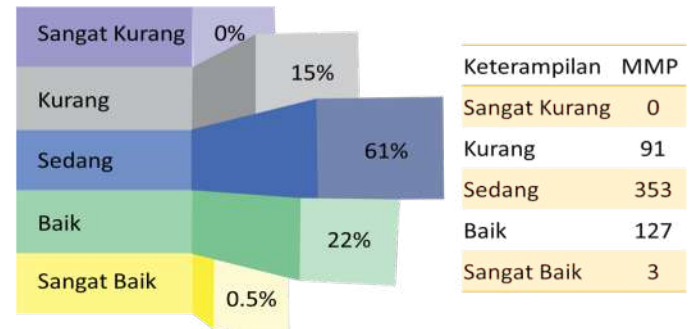
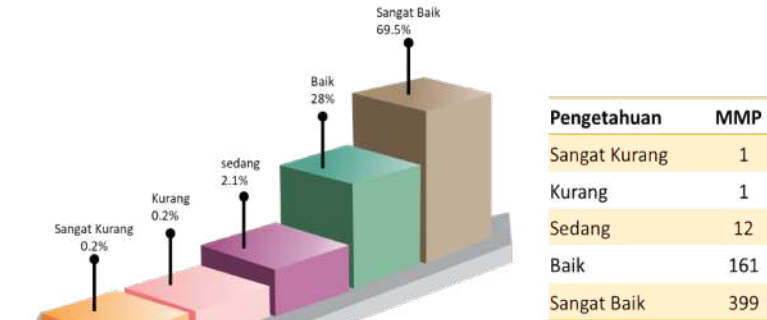
No	Kelompok Jabatan	Responden
1	MMP	574 orang
2	MPA	239 orang
3	Pemandu Wisata Alam	220 orang
4	Pemandu Wisata Gunung	94 orang
5	Auditor VLK	101 orang

Analisis kebutuhan pengembangan kompetensi SDM Non Aparatur dilakukan melalui pengisian instrumen berupa kuesioner dalam bentuk on line (Google Form).

Kuesioner tersebut disusun bersama dengan direktorat teknis pembina SDM Non Aparatur.

MASYARAKAT MITRA POLHUT

Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan yang selanjutnya disingkat MMP adalah kelompok masyarakat sekitar hutan yang membantu Polhut dalam pelaksanaan perlindungan hutan di bawah koordinasi, pembinaan dan pengawasan instansi pembina. Berdasarkan hasil pemetaan, secara umum tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas, sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa unit kompetensi yang masih perlu untuk dikembangkan.

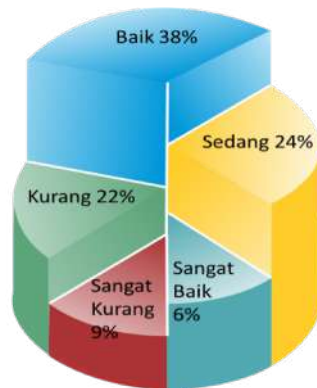


Kategori	MMP
Kurang	0
Sedang	26
Baik	487
Sangat Baik	61

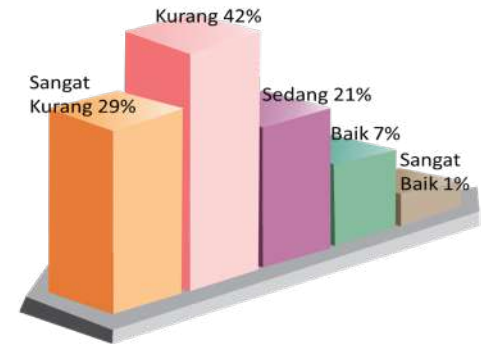
MASYARAKAT PEDULI API

Masyarakat Peduli Api (MPA) adalah masyarakat yang secara sukarela peduli terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah dilatih atau diberi pembekalan serta dapat diberdayakan untuk membantu kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pemetaan, secara umum tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas, sudah cukup baik namun masih memerlukan pengembangan kompetensi lebih lanjut.

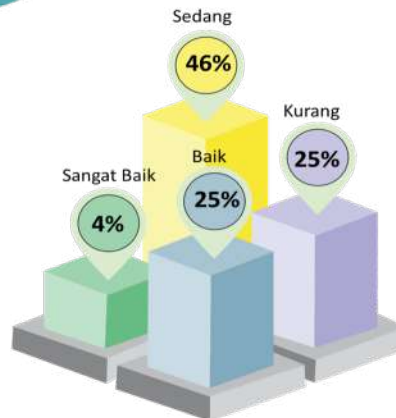
Pengetahuan	MPA
Sangat Kurang	22
Kurang	53
Sedang	58
Baik	91
Sangat Baik	15



Keterampilan	MPA
Sangat Kurang	69
Kurang	100
Sedang	51
Baik	16
Sangat Baik	3



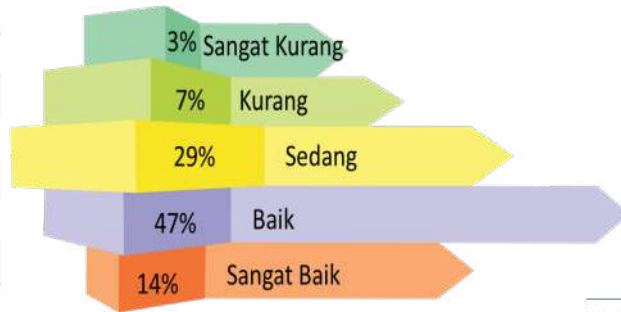
Indexs	MPA
Kurang	60
Sedang	110
Baik	60
Sangat Baik	9



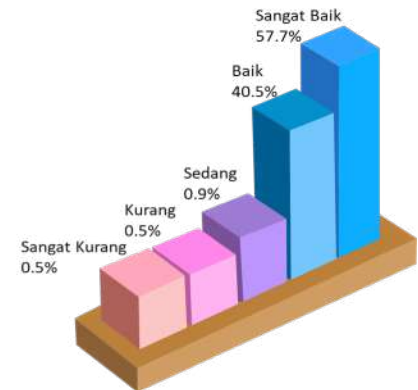
PEMANDU WISATA ALAM

Berdasarkan hasil pemetaan, secara umum tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas, sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa unit kompetensi yang masih perlu untuk dikembangkan.

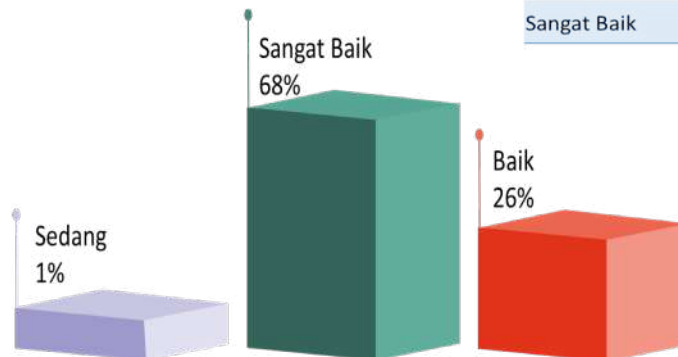
Pengetahuan	PWA
Sangat Kurang	7
Kurang	15
Sedang	63
Baik	104
Sangat Baik	31



Keterampilan	Jumlah
Sangat Kurang	1
Kurang	1
Sedang	2
Baik	89
Sangat Baik	127



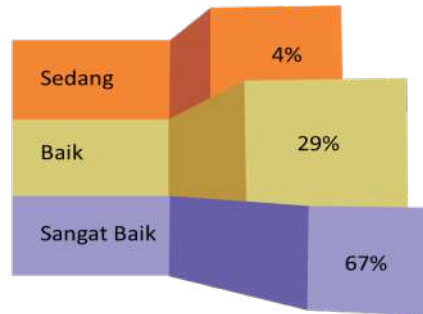
Indexs	Jumlah
Kurang	0
Sedang	2
Baik	58
Sangat Baik	150



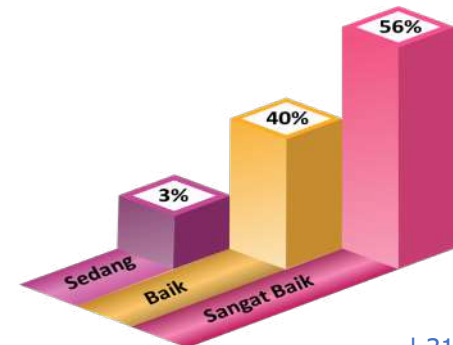
PEMANDU WISATA GUNUNG

Berdasarkan hasil pemetaan, secara umum tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas, sudah cukup baik, namun masih memerlukan pengembangan dalam beberapa hal.

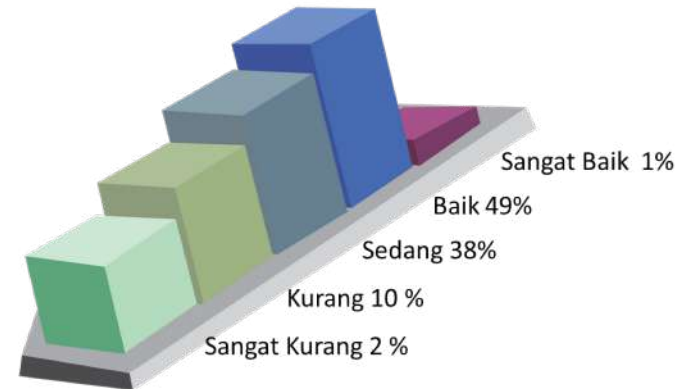
Keterampilan	Jumlah
Sangat Kurang	0
Kurang	0
Sedang	4
Baik	27
Sangat Baik	63



Kategori	Jumlah
Kurang	0
Sedang	3
Baik	38
Sangat Baik	53



Pengetahuan	PWG
Sangat Kurang	2
Kurang	9
Sedang	36
Baik	46
Sangat Baik	1



AUDITOR VLK

Berdasarkan hasil pemetaan, secara umum tingkat pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan kompetensi teknis dalam pelaksanaan tugas, sudah cukup baik, tetapi masih ada beberapa unit kompetensi yang masih perlu untuk dikembangkan.

Skala likert	Keterangan	Jumlah Responden	Prosentase
1	Sangat kurang		
2	Kurang		
3	Sedang		
4	Baik	54	53%
5	Sangat baik	47	47%
Total		101	100%

Tingkat Pengetahuan

Skala likert	Keterangan	Jumlah Responden	Prosentase
1	Sangat kurang		0%
2	Kurang		0%
3	Sedang	3	3%
4	Baik	14	14%
5	Sangat baik	84	83%

Tingkat Keterampilan

Kriteria Indeks	Kategori	Jumlah Responden	Prosentase
4-7	Kurang	0	0%
8-11	Sedang	0	0%
12-15	Baik	3	3%
16-20	Sangat Baik	98	97%
Jumlah responden		101	100

Indeks Kompetensi

INDIKATOR KINERJA 3



**JUMLAH SUMBERDAYA MANUSIA
LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN YANG MENINGKAT
KOMPETENSINYA**

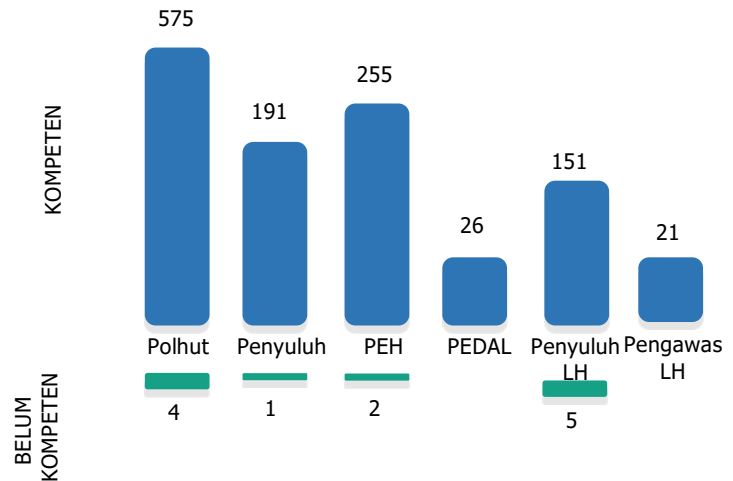
UJI KOMPETENSI/SERTIFIKASI SDM LHK

Sumber Daya Manusia yang kompeten sangat diperlukan, yaitu SDM yang memiliki kompetensi tertentu yang meliputi aspek pengetahuan (*knowledge, science*), keterampilan (*skill, technology*), dan sikap perilaku (*attitude*) yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan pekerjaan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk memastikan kompetensi SDM melalui uji kompetensi/ sertifikasi kompetensi.

Pelaksanaan uji kompetensi dimaksudkan sebagai sarana untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid, asli, terkini dan memadai sebagai dasar apakah peserta uji sudah kompeten atau belum kompeten terhadap unit kompetensi yang diujikan. Uji Kompetensi dilakukan melalui proses penilaian (*assesment*) baik teknis maupun non teknis melalui pengumpulan bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang telah kompeten atau belum kompeten pada skema sertifikasi tertentu. Uji kompetensi bersifat terbuka, tanpa diskriminasi dan diselenggarakan secara transparan. Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi dalam uji kompetensi adalah *valid, reliable*, fleksibel, adil, efektif dan efisien, berpusat pada peserta uji kompetensi dan memenuhi syarat keselamatan kerja.

Tahun 2021, target kegiatan Uji Kompetensi/Sertifikasi SDM LHK sebanyak 1.000 orang. Pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan secara online maupun tatap muka terbatas terhadap 6 jenis jabatan yaitu Polisi Kehutanan, Penyuluhan Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan, Pengawas LH, Pengendali Dampak Lingkungan, Penyuluh LH.

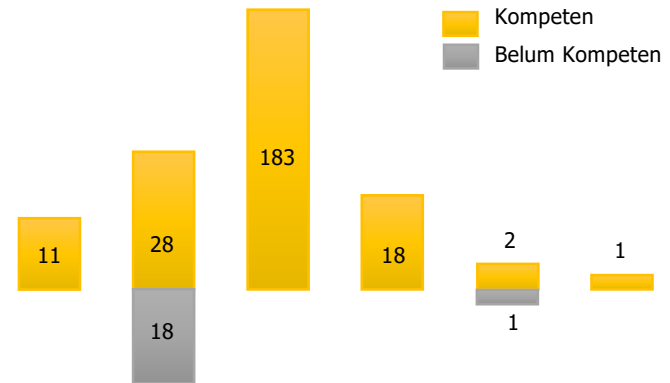
Adapun hasil uji sebanyak 1.219 orang dinyatakan kompeten dan 12 orang dinyatakan belum kompeten. Adapun rincian hasil per jenis jabatan adalah sebagai berikut:



Capaian uji kompetensi sebanyak 1.219 orang terdiri dari pelaksanaan uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional sebanyak 1.068 orang dan pengangkatan jabatan fungsional melalui penyesuaian/inpassing sebanyak 151 orang sehingga realisasi melebihi target yang ditetapkan.

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 34 tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional penyuluh Lingkungan Hidup jabatan fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup, dan Peraturan Menteri LHK nomor P25/Menlhk-Setjen/Kum.1/12/2020 tentang Tata Cara Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Melalui Penyesuaian/Inpassing maka untuk mengisi kebutuhan jabatan fungsional tersebut dilakukan inpassing pada tahun 2021.

Selain pelaksanaan uji kompetensi/sertifikasi kompetensi untuk kenaikan jenjang ataupun pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional melalui inpassing, Pusat Perencanaan Pengembangan SDM juga melayani pelaksanaan uji kompetensi alih jabatan bagi PNS yang akan beralih jabatan ke jabatan fungsional. Pada tahun 2021, telah dilaksanakan uji kompetensi alih jabatan dengan hasil sebanyak 242 orang dinyatakan kompeten dan layak untuk diangkat ke dalam jabatan fungsional, sedangkan 19 orang dinyatakan belum kompeten. Adapun rincian hasil per jenis jabatan adalah sebagai berikut:



Setiap tahun, usulan calon peserta uji kompetensi baik usulan dari pusat maupun daerah dapat dikatakan sangat banyak. Namun, belum semuanya dapat difasilitasi dikarenakan anggaran yang tersedia tidak memadai. Untuk mengatasi kendala tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM cq Pusat Perencanaan Pengembangan SDM berkoordinasi dengan unit kerja baik lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Dinas/Instansi Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melaksanakan uji kompetensi dengan skema kerjasama (cost sharing).

REALISASI ANGGARAN

Kegiatan Pusrenbang SDM pada tahun 2021 memiliki anggaran sebesar Rp. 5.652.645.000,- yang tertuang pada dokumen DIPA Tahun 2021 Satuan Kerja Kantor Pusat Badan P2SDM Nomor: SP DIPA-029.08.1.465019/2021. Selama tahun anggaran berjalan terdapat beberapa perubahan pagu anggaran oleh karena adanya refocusing anggaran dengan adanya situasi darurat pandemi COVID-19. Selain itu, revisi belanja pegawai (51) DIPA Kantor Pusat Badan P2SDM untuk belanja penanganan COVID pada bulan Oktober 2020. Adapun Pagu Anggaran Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM di akhir tahun anggaran sebesar Rp. 4.889.899.000,-..

Dalam pencapaian target kinerja tahun 2021, realisasi penggunaan anggaran tahun 2021 mencapai Rp. 4.888.805.719,- atau 99,98% dari Pagu Anggaran yang tersedia. Adapun rincian anggaran per komponen adalah sebagai berikut:

Komponen	PAGU ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	650.000.000	649.425.585	99,91
Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	675.000.000	674.877.792	99,98
SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya	1.549.995.000	1.549.730.763	99,98
Layanan Dukungan Manajemen	2.014.904.000	2.014.771.579	99,99
JUMLAH	4.889.899.000	4.888.805.719	99,98

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

PERMASALAHAN

Selama tahun 2021 permasalahan yang sempat menjadi penghambat dalam pencapaian kinerja dan realisasi anggaran antara lain:

- 1) Tidak terdapatnya database PNS yang menduduki jabatan fungsional pada instansi/dinas yang menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan di daerah.
- 2) Tidak tersedianya data tenaga Non Aparatur pada unit eselon I pembina

TINDAK LANJUT

Sehubungan dengan adanya beberapa permasalahan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, tindak lanjut yang dilakukan untuk pencapaian target kinerja tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi/dinas yang menangani bidang lingkungan hidup dan kehutanan di daerah untuk mendata jumlah PNS yang menduduki jabatan fungsional untuk dijadikan database sasaran responden pemetaan kompetensi SDM Aparatur
- 2) Melakukan perubahan sasaran jenis Non Aparatur yang akan di petakan kompetensi serta berkoordinasi dengan unit Eselon I pembinaanya untuk melakukan pendataan jenis Non Aparatur tersebut.

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Pusrenbang SDM Tahun 2021 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusrenbang SDM dengan mengacu pada Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Penyusunan Laporan Kinerja Pusrenbang SDM mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun kesimpulan dari Laporan Kinerja Pusrenbang SDM, yaitu:

1. Capaian kinerja Pusrenbang SDM tahun 2021 sebesar 107,3 % menunjukkan bahwa semua target kinerja yang telah ditetapkan telah tercapai.
2. Kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat berjalan dengan semestinya karena adanya anjuran pemerintah untuk menerapkan pembatasan sosial, penerapan protokol kesehatan, dan adanya social dan physical distancing.
3. Sebagai tindak lanjut dari keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan dengan protokol kesehatan, kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengumpulkan banyak orang diadakan secara Online.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait mengenai tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan. Secara internal Laporan Kinerja ini dapat dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Ade Paiguna

Jabatan : Pjt. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Helmi Basalamah, MM

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Ir. Helmi Basalamah, MM
NIP. 19611119 198802 1 001

Jakarta, Desember 2020
Pihak Pertama,



Drs. Ade Paiguna
NIP. 19650924 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja / Rincian Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten	Layanan Sertifikasi dan uji kompetensi SDM LHK Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1.200 orang 1 Layanan 1 Layanan

Kegiatan

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM

2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM

Anggaran

Rp5.652.645.000,-

Pihak Kedua,


Ir. Helmi Basalamah, MM
NIP. 19611119 198802 1 001

Jakarta, Desember 2020
Pihak Pertama,

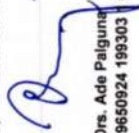

Drs. Ade Palguna
NIP. 19650924 199303 1 001

TARGET TRIWULAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja / Rincian Output	Target	B03	B06	B09	B12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten	Layanan Sertifikasi dan uji kompetensi SDM LHK Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	1.200 orang	0 orang	250 orang	600 orang	1.200 orang
2.			1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
3.		Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan

Catatan:
B03 : Target Triwulan I
B06 : Target Triwulan II
B09 : Target Triwulan III
B12 : Target Triwulan IV

Jakarta, Desember 2020


Drs. Ade Palguna
NIP. 19650924 199303 1 001

Lampiran 2. Revisi Perjanjian Kinerja antara Kepala pusrenbang SDM dengan Kepala Badan P2SDM



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Palguna Ruteka

Jabatan : Pjt. Kepala Pusat Perencanaan dan Pengembangan SDM
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Ir. Helmi Basalamah, MM

Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut akan melaksanakan pengawasan melekat berjenjang, internalisasi revolusi mental serta mendorong dan membangun generasi berwawasan lingkungan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Ir. Helmi Basalamah, MM
NIP. 19611119 198802 1 001

Jakarta, Agustus 2021
Pihak Pertama,



A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)
1.	Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten	Jumlah SDM LHK Bersertifikat kompetensi Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	1.000 orang 1 Layanan (5 Jenis Jabatan)
		Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1 Layanan (5 Jenis Jabatan)

Kegiatan

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM
2. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Badan P2SDM

Anggaran

Rp 3.220.980.000,-

Pihak Kedua,


Ir. Helmi Basalamah, MM
NIP. 19611119 198802 1 001

Jakarta, Agustus 2021

Pihak Pertama,



A. Paiguna Rutelila
NIP. 19650924 199303 1 001

TARGET TRIWULAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
PUSAT PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SDM

No. (1)	Sasaran Kegiatan (2)	Indikator Kinerja Kegiatan (3)	Target (4)	B05 (5)	B06 (6)	B09 (7)	B12 (8)
1.	Tersedianya SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Kompeten	Jumlah SDM LHK Bersertifikat kompetensi	1.000 orang	-	250 orang	600 orang	1.000 orang
2.	Kompeten	Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	1 Layanan (5 Jenis Jabatan)	-	-	-	1 Layanan (5 Jenis Jabatan)
3.		Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	1 Layanan (5 Jenis Jabatan)	-	-	-	1 Layanan (5 Jenis Jabatan)

Catatan:

B05 : Target Komulatif Triwulan II, B06 : Target Komulatif Triwulan II, B09 : Target Komulatif Triwulan III, B12 : Target Komulatif Triwulan IV

Jakarta, Agustus 2021



A. Paiguna Rutelila
NIP. 19650924 199303 1 001

Lampiran 3. Rincian Pelaksanaan Uji Kompetensi 2021

No	Provinsi	KENAIKAN JENJANG JABATAN																				Inpassing				
		POLHUT				PK				PEH				PEDAL				PLH				PENYULUH LH				
		KOMPETEN		BELUM KOMPETEN		KOMPETEN		BELUM KOMPETEN		KOMPETEN		BELUM KOMPETEN		KOMPETEN		BELUM KOMPETEN		KOMPETEN		BELUM KOMPETEN		KOMPETEN		BELUM KOMPETEN		
		Orang				Orang				Orang				Orang				Orang				Orang				
L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	43	44	45	46	
1	ACEH	17	2	1											1			1					1	1		
2	SUMATERA UTARA	15	1	1		6	4			10	3												1	1		
3	SUMATERA BARAT	23					3			2																
4	RIAU	40	2			7	1			6	5											21	9	1	1	
5	KEP. RIAU									1					1											
6	JAMBI	30	3			10	6			5	4											2	4			
7	BENGKULU	5									2			1	2											
8	SUMATERA SELATAN	22	1			12	8			5	4			2	2							5	1			
9	KEP. BANGKA BELITUNG	2				4	2								1							6				
10	LAMPUNG	50	1	1		7	2			11	1															
11	BANTEN					2	1			1	2				1									2		
12	DKI JAKARTA	2									1				2			6	6			26	23	1		
13	JAWA BARAT	29	4			1	5			19	10		2	2	2				2			5	10			
14	JAWA TENGAH	8				19	10			9	4				3			1				1	1			
15	JAWA TIMUR	16	6			1				15	4											5	4			
16	DI. YOGYAKARTA	9	1			1	1			3	3							1				4	8			
17	BALI	8	3							11	9											2				
18	NUSA TENGGARA BARAT	12				8	3			4	4				1											
19	NUSA TENGGARA TIMUR	3				4	8	1		5	3															
20	KALIMANTAN BARAT	15	1			2				4	1															
21	KALIMANTAN TIMUR	18	1			2	4			11	7				1			1				4	3			
22	KALIMANTAN TENGAH	18	1	1		1	3			12	4				1											
23	KALIMANTAN SELATAN	1				1				2	2			1				1	1							
24	KALIMANTAN UTARA	7	1			2	3			1																
25	SULAWESI SELATAN	49	7			4	4			9	1			2				1				1	1			
26	SULAWESI UTARA	10				1				2	1															
27	SULAWESI TENGAH	32	1			9	9			5	2															
28	SULAWESI TENGGARA	14				1				7	1															
29	SULAWESI BARAT	22	1			4	1			2																
30	MALUKU	2																								
31	MALUKU UTARA	8				2																				
32	PAPUA	17				2				9	1											1				
33	PAPUA BARAT	34								5																
34	LSP LUK SDM APARATUR																									
Jumlah Tahun 2021		538	37	4	0	113	78	1	0	176	79	0	2	8	18	0	0	11	10	0	0	84	67	2	1	
		575		4		191		1		255		2		26		0		21		0		151		3		